



Jokowi Teken UU Kementerian Terbaru

Jakarta, MIMBAR - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merestui penambahan menteri di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui Undang-Undang Kementerian Negara. Jokowi menandatangani undang-undang yang sebelumnya disepakati pemerintah dan DPR itu. Regulasi itu resmi berlaku 15 Oktober 2024 dengan nama Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

■ Bersambung ke Hal 11

Spanduk atau baliho yang bertuliskan Terima Kasih Jokowi (2014-2024) ini tersebar di sejumlah jalan utama kota Jakarta. (Foto Liputan6.com)



Jokowi Bentuk Korps Pemberantasan Korupsi Polri

Jakarta, MIMBAR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pembentukan korps baru itu diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024. Jokowi menandatangani aturan baru itu pada Selasa, 15 Oktober 2024. "Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang

■ Bersambung ke Hal 11

Banjir Aceh Tewaskan Seorang Warga

Aceh, MIMBAR - Tingginya curah hujan beberapa hari terakhir ini mengakibatkan sejumlah daerah di Aceh terendam banjir. Bencana ini juga menyebabkan seorang warga di Aceh Tenggara meninggal dunia.



Beberapa daerah yang masih dilanda banjir sejak beberapa hari lalu adalah Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil dan Aceh Tamiang. Berdasarkan data dirilis Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), sejumlah desa di Subulussalam saat ini masih digenangi air.

Banjir di daerah tersebut terjadi sejak Kamis 10 Oktober setelah diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi. Hujan menyebabkan meluapnya sungai Lae Soraya sehingga awalnya merendam tiga desa di Kecamatan Sultan Daulat.

Bencana itu kemudian meluas ke sejumlah desa di lima kecamatan. Banjir juga menggenangi jalan nasional sehingga akses transportasi di saat terganggu.

"Saat ini air masih menggenangi pemukiman warga dan merendam jalan desa baik kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Rundeng dan kecamatan Longkib, serta air masih merendam jalan nasional Subulussalam-Tapakuan," kata Kepala Pelaksana BPBA Teuku Nara Setia dalam keterangannya, Kamis (17/10).

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

14 RABIUL AKHIR 1446 H

Subuh : 04:54 WIB	Maghrib : 18:14 WIB
Zuhur : 12:14 WIB	Isya : 19:23 WIB
Ashar : 15:30 WIB	■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah Mahasiswa Digital Tak Kritis

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UIINSU)

MAHASISWA digital adalah generasi yang tumbuh dengan teknologi, memiliki akses mudah ke informasi dan alat pembelajaran online. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap inovasi, memanfaatkan platform digital untuk kolaborasi dan pembelajaran. Namun, tantangan seperti kecanduan teknologi, pengelolaan waktu, dan kelebihan informasi juga perlu dihadapi.

Rasa pesimistis terhadap mahasiswa digital bisa muncul dari beberapa faktor, seperti:

■ Bersambung ke Hal 11

Israel Makin Brutal

Lebanon, MIMBAR - Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defence Force/IDF) mengeklaim telah membunuh seorang komandan batalion Hizbullah di distrik Bint Jbeil, Lebanon Selatan, Kamis (17/10).

■ Bersambung ke Hal 11



Serangan udara Israel menghantam markas pemerintah kota Nabatieh, Lebanon selatan pada Rabu (16/10/2024). (Foto Liputan6.com)

LINKKAR Sumut Desak Pj Gubsu Copot Kadisdiksu

Medan, MIMBAR - Lintas Kajian Kaum Gerakan (LINKKAR) Sumatera Utara mendesak Pj Gubsu Agus Fatoni untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumatera Utara Ir. Abdul Haris Lubis. Desakan tersebut disampaikan saat menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Gubernur dan DPRD Sumut, serta Kantor Dinas Pendidikan Sumut, Kamis (17/10/2024).

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan LINKKAR Ahmad Karim menuding Kadisdik Sumut dan Kabid Pendidikan Disdik Sumut, bersama oknum Aparat Penegak Hukum (APH) telah bekerjasama mengintimidasi sejumlah kepala kepala sekolah SMA dan SMK se Sumatera Utara untuk Pengelolaan dana Alokasi Khusus (DAK) Bagian

Fisik Tahun Anggaran 2024. "DAK Tahun 2024 seharusnya dikerjakan masyarakat sekitaran sekolah SMA dan SMK, tapi kenyataannya malah dikerjakan oleh Rekanan Luar Daerah," ungkap Karim.

Selain itu, mereka juga meminta kepada Jaksa Agung Dr ST Burhanuddin SH MM

■ Bersambung ke Hal 11



Kepala Inspektorat Deliserdang Rampas Kamera Wartawan

Deliserdang, MIMBAR - Rekaman video Kepala Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) Edwin Nasution ribut dengan wartawan viral di media sosial.

Dalam video itu, Edwin sempat merampas kamera dan nyaris memukul wartawan tersebut.

Dalam rekaman video itu, tampak Edwin Nasution yang mengenakan kemeja putih awalnya meladeni pertanyaan beberapa wartawan di depan kantornya. Kemudian Edwin menegur salah satu wartawan bernama Amiruddin yang ingin merekam pernyataan Edwin.

■ Bersambung ke Hal 11

Calon Bupati Tapteng Tuntut Keadilan

Masinton Marahi Polisi

SEBUAH video yang menampilkan calon Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu marah-marah ke polisi saat di KPU viral di media sosial. PDIP pun buka suara terkait peristiwa itu.

Dilansir dari Detikcom, Kamis (17/10/2024), terlihat Masinton sedang duduk di sebuah meja di dalam ruangan. Dalam video itu, terlihat juga Plt Ketua PDIP Tapteng Sarma Hutajulu bersama yang lainnya.

Masinton terlihat marah kepada pria berbaju putih yang diduga seorang polisi. Masinton mempertanyakan kenapa polisi tidak berlaku adil.

"Apa kalian ini, nggak bisa berlaku adil, preman pun kalian biarkan masuk, polisi apa kalian



ini? Apa tanggung jawab kalian untuk menjaga keamanan di republik ini, tidak bisa begitu Bapak, kalian coba adil lah, adil itu sejak dalam pikiran, tindakan pun pasti adil," kata Masinton dalam video.

Mantan anggota DPR RI itu kemudian menegaskan jika terjadi konflik horizontal antar pendukung, maka polisi menjadi

pemicunya. Hal itu karena polisi dinilai tidak bisa memberikan rasa adil dan keamanan.

"Kalau tadi terjadi konflik horizontal siapa yang kalian persalahkan? Masyarakat yang akan menjadi korban, kalian tinggal nangkabin-nangkabin aja, kalian pemicunya kok, kalian pemicunya,"

■ Bersambung ke Hal 11



■ Semoga segera berakhir ...
■ Aamiin.

Israel Makin...

Dari Halaman 1

Dalam pernyataan terbarunya, IDF menyebutkan bahwa komandan Hizbullah itu bernama Hussein Muhammed Auda. Auda memiliki peran mengepaloi operasi serangan roket ke Israel yang berasal dari beberapa kota di distrik Bint Jbeil.

Dalam pernyataan itu, Israel juga mengklaim bahwa serangan udaranya selama 24 jam terakhir telah menewaskan 45 milisi Hizbullah. Selain itu, 150 situs Hizbullah juga disebut hancur selama serangan udara Israel tersebut.

Dikutip Time of Israel, Israel menuturkannya ratusan situs Hizbullah itu termasuk gudang senjata, peluncur roket, dan bangunan yang digunakan untuk keperluan militer. IDF juga turut mengunggah sejumlah gambar dan video melalui akun X nya terkait serangan-serangannya ke Lebanon dalam satu hari terakhir itu.

Israel terus melancarkan gempuran udara dan invasi darat secara membabi

buta ke Lebanon. Dalam waktu 36 jam atau 1,5 hari terakhir Tel Aviv telah meluncurkan nyaris 340 serangan udara ke negara tetangganya itu.

Jurnalis Al Jazeera Imran Khan melaporkan bahwa serangan Israel ini terkonsentrasi di Hasbiyya.

Melihat Israel menggila, Hizbullah tak tinggal diam. Mereka balik menyerang dengan meluncurkan salvo rudal.

Salvo rudal merupakan penembakan rudal secara bersamaan dalam suatu pertempuran. Istilah "salvo" juga bisa merujuk ke bom atau roket yang dilepaskan dalam konflik.

Hizbullah juga mengklaim berhasil menembak pesawat nirawak atau drone Israel.

Dalam beberapa pekan terakhir, Israel menggempur habis-habisan Lebanon. Mereka bahkan menyerang pos pasukan penjaga perdamaian PBB di negara itu (UNIFIL).

Serangan Israel di Lebanon sejak 16 September telah menyebabkan 1.500 warga sipil tewas. (cnni/js)

Jokowi Bentuk...

Dari Halaman 1

pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri," bunyi pasal 20A ayat (1) Perpres 122/2024.

Korps itu bertugas membantu Kapolri dalam membina, mencegah, menyelidiki, dan menyidik dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga bertugas melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi. Korps ini dipimpin oleh seorang kepala yang berpangkat inspektur jenderal. Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai satu orang wakil.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggagas pembentukan satuan khusus pemberantasan korupsi. Hal itu ia ungkap setelah melantik Novel Baswedan dan 43 mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri.

Listyo mengatakan satuan baru itu akan langsung bertanggung jawab ke Kapolri. Kasus korupsi tidak akan lagi menjadi tanggung jawab Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim).

"Harapannya semua kita lakukan untuk betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Khususnya yang belum mendapatkan perhatian dan pelayanan khusus," kata Listyo di Hotel Tribbrata, Jakarta Selatan, Kamis (29/2). (cnni/js)



Mahasiswa Digital...

Dari Halaman 1

Kekhawatiran bahwa mahasiswa terlalu bergantung pada perangkat digital, sehingga mengurangi keterampilan berpikir kritis dan analitis.

Dampak negatif dari media sosial dapat mengganggu fokus dan kesehatan mental, mengalihkan perhatian dari pembelajaran. Disamping itu ada kekhawatiran bahwa kemudahan akses informasi tidak selalu disertai dengan pemahaman mendalam yang dapat mengurangi kualitas pendidikan.

Interaksi yang lebih sedikit secara tatap muka dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam membangun hubungan dan komunikasi yang efektif. Paparan Paparan informasi yang beragam dan kadang kontradiktif bisa menyebabkan kebingungan identitas dan nilai di kalangan mahasiswa.

Sesungguhnya berpikir kritis analitis sangat penting bagi mahasiswa karena kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam membantu individu membuat keputusan yang lebih informasional dan tepat.

Berpikir kritis memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi akar masalah dan mengevaluasi berbagai solusi secara objektif. Mengembangkan argumen yang jelas dan logis meningkatkan kemampuan komunikasi, baik lisan

maupun tulisan.

Kemudian analisis mendalam terhadap informasi dapat memicu ide-ide baru dan pendekatan inovatif. Berpikir kritis mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menilai dan mempertanyakan sumbernya. Berpikir kritis membantu individu memahami isu-isu kompleks dalam masyarakat dan mengambil sikap yang lebih terinformasi.

Jika mahasiswa kehilangan kemampuan berpikir kritis dan analitis, beberapa dampak negatif dapat muncul: Mahasiswa mungkin membuat keputusan berdasarkan asumsi atau informasi yang tidak akurat yang dapat berdampak pada karier dan kehidupan pribadi.

Tanpa kemampuan analitis, mereka mungkin kesulitan menghadapi tantangan kompleks dan menemukan solusi yang efektif. Kemudian kurangnya pemikiran kritis dapat menghambat kemampuan untuk berinovasi atau menghasilkan ide-ide baru. Mereka lebih rentan terhadap informasi yang menyesatkan dan mungkin tidak dapat membedakan antara fakta dan opini.

Keterampilan berargumentasi dan berkomunikasi secara efektif bisa menurun, sehingga mempersulit interaksi dengan orang lain. Tanpa kemampuan kritis, mahasiswa mungkin kurang peka terhadap isu-isu sosial dan tidak terlibat dalam perubahan positif. (*)

Jokowi Teken...

Dari Halaman 1

Kementerian Negara.

Salah satu pasal yang diubah dalam undang-undang itu adalah pasal 15. Pasal tersebut mengatur soal kewenangan presiden mengotak-atik jumlah kementerian, dan tak dibatasi seperti pada undang-undang sebelumnya.

"Jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden," bunyi pasal 15 di UU Kementerian Negara yang baru.

Pada UU Kementerian Negara sebelumnya, jumlah kementerian dibatasi. Presiden hanya boleh membuat maksimal 34 kementerian.

UU Kementerian Negara yang baru mengandung dua bagian perubahan. Bagian pertama menambah pasal 6A dan 9A. Bagian itu juga mengubah ketentuan di pasal 15 dan 25. Begitu pula penghapusan pasal 10 dan perubahan judul Bab VI.

Bagian kedua mengatur pengawasan pelaksanaan UU Kementerian Negara yang harus dilakukan oleh DPR.

"Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku berdasarkan mekanisme yang diatur dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaannya," bunyi poin satu Pasal II UU Kementerian Negara baru.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto berniat menambah jumlah kementerian di kabinetnya. Niat itu diikuti revisi UU Kementerian Negara. Prabowo sudah memanggil 108 orang calon menteri, wakil menteri, dan kepala negara. Diduga sebanyak 49 orang di antaranya adalah calon menteri.

Prabowo dan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober mendatang di MPR, Jakarta. Pada hari itu juga menjadi momen berakhirnya masa pemerintahan Jokowi yang sudah dua periode atau sepuluh tahun menjadi Presiden RI. (cnni/js)

Kepala Inspektorat...

Dari Halaman 1

Edwin pun menanyakan apakah wartawan tersebut sudah meminta izin untuk merekam pernyataannya.

"Kau video video udah izin kau? Kau ambil video sudah ada minta izin enggak kau? Sekarang kau minta izin dulu ke aku kalau kau mau memvideokan. Apa kau, kalau mau ambil video minta izin," kata Edwin sambil marah-marah.

Edwin tak terima dengan sikap Amiruddin yang merekamnya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Kemudian Edwin juga mendorong Amiruddin. Setelah itu ia merampas ponsel yang digunakan Amiruddin untuk melakukan peliputan.

Dalam video lainnya, sejumlah pria berbaju putih juga ikut terlibat cekcok dengan wartawan. Terlihat wartawan dan pegawai berbaju putih itu terlibat cekcok hingga akhirnya dilerai.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Amiruddin mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu (16/10) sekitar pukul 11.00 WIB. Kejadian bermula saat sejumlah wartawan mendapatkan informasi terkait Bawaslu Kecamatan Lubukpakam melakukan pemeriksaan anggota Inspektorat yang tidak netral dalam Pilkada.

"Awalnya itu kan dapat informasi bahwa ada Bawaslu Kecamatan Lubukpakam datang ke inspektorat Deli Serdang untuk melakukan pemeriksaan oknum ASN yang tak netral. Karena sudah dua kali Bawaslu melayangkan surat panggilan, tapi oknum ASN ini enggak datang," kata Amiruddin, Kamis (17/10).

Amiruddin pun mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Sampai di sana, ia langsung menuju ke ruang lobi. Beberapa temannya yang juga wartawan telah menunggu untuk melakukan peliputan.

"Dapat informasi itu, saya rasa bagus ini. Lalu meluncur lah ke sana. Sampai di sana ada dua kawan wartawan sudah menunggu juga. Enggak beberapa lama kami duduk ada beberapa staf di situ keluar masuk kayaknya gelisah dengan kedatangan wartawan," ujarnya.

Saat wartawan datang, pemeriksaan masih berlangsung di ruangan Edwin Nasution. Setelah Edwin Nasution keluar dari ruangan-

nya, Amiruddin bersama wartawan lainnya menemui Edwin untuk wawancara terkait pemeriksaan tersebut. Kemudian Amiruddin pun langsung merekam pernyataan Edwin. Namun saat Amiruddin merekam, Edwin marah marah.

"Alat kerja saya kan ada dua, kamera besar dan handphone. Karena mau cepat, saya pakai handphone untuk merekam. Jadi Saya rekam terus dari dia (Edwin) keluar itu sampai ke ruang depan teras. Sampai di teras salah satu teman wartawan bilang bang ijin konferensi pers. Kebetulan dia (Edwin) tahun setelah wartawan ini. Dia (Edwin) sempat ngomong memberi statemen, tapi saat melihat saya merekam, dia marah marah seperti video yang beredar," jelasnya.

Menurut Amiruddin, Edwin juga sempat mendorongnya hingga nyaris memukulnya. Tak sampai di situ, Edwin juga merampas ponsel yang digunakan Amiruddin untuk merekam. Edwin mengancam membanting ponsel Amiruddin. Saat keributan terjadi, beberapa pegawai keluar mencoba mengeroyok Amiruddin.

"Kemudian di dekatnya lagi dirampasnya HP saya. Keluar beberapa staf nya yang lain ingin mengeroyok saya. Terus HP saya yang dipegangnya itu mau dibanting. Ya udah kau banting aja, saya bilang. Banting lah. Nanti kupukul kau, begitu kata si kepala inspektorat," urai Amiruddin.

"Saya bilang kau pukul aja, kemudian kami pun dilerai," tambahnya.

Setelah itu, Edwin masuk ke dalam ruangannya. Ponsel milik Amiruddin pun dikembalikan melalui salah seorang wartawan lainnya. Namun situasi kembali memanas. Sebab salah seorang pegawai mencoba memprovokasi. Wartawan lainnya bernama Fani Ardana terlibat adu mulut dan nyaris dipukul.

"Situasi kembali panas ada kawan kami namanya Fani itu terlibat lagi keributan dengan stafnya. Padahal niat si Fani ini menghalangi agar saya tak dipukuli. Jadi saat itu ada pegawai yang memprovokasi sambil membilang pukul pukul. Tapi akhirnya dipisahkan," terangnya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Edwin Nasution memberikan pernyataan tertulis mengenai peristiwa itu. Dia menolak dikonfirmasi melalui telepon.

Banjir Aceh...

Dari Halaman 1

Sementara di Kecamatan Sultan Daulat, katanya, sudah dapat dilalui kendaraan. Nara menyebutkan, banjir di Kecamatan Simpang Kiri saat sudah surut. Selain di Subulussalam, banjir juga menggenangi 82 desa di 13 kecamatan di Aceh Tenggara. Banjir di sana terjadi sejak Rabu (9/10) akibat meluapnya sejumlah sungai setelah diguyur hujan deras.

Pada Sabtu (12/10), terjadi longsor di Desa

Kati Maju Kecamatan Ketambe dan Desa Bun-Bun Alas Kecamatan Leuser sehingga sempat menghambat lalu lintas. Namun setelah tim gabungan turun tangan, material longsor berhasil dibersihkan.

Banjir di sana juga menyebabkan sejumlah kerusakan terutama pada jembatan, tanggul serta badan jalan. Tim gabungan hingga kini masih berusaha memperbaiki tanggul yang jebol.

"Banjir di Aceh Tenggara menyebabkan

satu orang warga Tanjung Aman, Kecamatan Darul Hasanah atas nama Redi (28) meninggal dunia," ujarnya.

Sementara di Aceh Selatan, banjir juga masih menggenangi pemukiman penduduk. Namun akses jalan nasional saat ini sudah dapat dilewati kembali.

"Air sudah surut jalan nasional kembali normal. Untuk pemukiman warga air masih tergenang," kata Kalak BPBD Aceh Selatan Zainal saat dimintai konfirmasi terpisah. (det/js)

LINKKAR Sumut...

Dari Halaman 1

menurunkan Team SATGASSUS JAMPID-SUS RI untuk memeriksa oknum aparat yang ikut 'bermain' dalam proyek tersebut.

"Kita juga meminta kepada kejaksaan untuk memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara beserta Oknum Kepala Bidang SMA & SMK Sumatera Utara," ucap Ahmad Karim.

Desakan serupa juga disampaikan kepada institusi POLRI. Mereka juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit segera menurunkan Tim Penyelidik dari MABES POLRI untuk memeriksa Oknum APH tersebut yang diduga berkolaborasi dengan Kepala Dinas Pendidikan

Sumatera Beserta Kepala Bidang SMA dan SMK.

Aksi unjukrasa di Kantor DPRD Sumut tersebut diterima oleh Humas DPRD Sumatera Utara, Sofyan Tanjung. Ia menyatakan akan menyampaikan keluhan pengunjukrasa kepada pimpinan dewan.

"Nanti akan kita sampaikan. Namun perlu diingat bahwa DPRD SUMUT hingga hari ini belum memiliki komisi-komisi," sahut Sofyan Tanjung.

Sementara, saat berunjukrasa di Kantor Gubernur Sumut, mereka diterima oleh Humas dan Biro Hukum Pemprov Sumut, yang menyatakan, aspirasi para pengunjukrasa akan

disampaikan kepada Pj Gubernur Sumut.

"Saat ini Pak Gubernur sedang tidak berada di kantor, namun kita akan menyampaikan hal ini kepada Pak Gubernur. Bila kawan-kawan bersedia untuk audiensi dengan bapak Pj Gubernur Sumatera Utara, agar permasalahan ini kita bahas bersama," sahutnya.

Sedangkan saat berunjukrasa di Kantor Disdik Sumut, mereka disambut oleh Kabid Disdik Sumatera Utara Basir Hasibuan. Ia juga menyatakan akan menyampaikan hal ini kepada kepala dinas pendidikan.

"Akan kami pelajari serta menyampaikan kepada kepala dinas yang saat ini sedang tugas luar," ungkap Basir. (A-10)

Masinton Marahi...

Dari Halaman 1

jadi kalau ada apa besok, pemicunya adalah polisi karena kalian tidak bisa memberikan rasa adil, tidak bisa menjamin keamanan," ucapnya.

"Apa tadi itu, kalau tidak kita tahan, apa enggak chaos itu? Kek mana kalian ini, ayam sayur semua," imbuhnya.

Dalam video itu terlihat seorang pria berbaju polisi berbicara dengan pria berbaju putih yang juga diduga polisi. Keduanya kemudian meninggalkan ruangan tersebut.

Plt Ketua PDIP Tapteng Sarma Hutajulu menyebutkan jika peristiwa di dalam video terjadi pada 4 September 2024 saat mendaftar pertama kali Masinton-Mahmud ke KPU. Sarma menilai video itu seolah-olah memframing jika Masinton merupakan sosok yang tempramen.

"Video itu pada saat kami pendaftaran tanggal 4 September yang lalu, saya tidak tahu apa

motivasi video itu sekarang jadi viral, saya melihat seolah-olah ada framing terhadap Masinton ini orangnya tempramen dan suka marah-marah," sebut Sarma Hutajulu saat dihubungi.

Menurut Sarma ada rangkaian peristiwa yang tidak terdapat di video. Saat mereka mendaftar di KPU, tiba-tiba pasangan calon lain datang ke KPU tahap agenda yang jelas.

"Di tengah-tengah kami melakukan pendaftaran di KPU Tapteng itu, tiba-tiba datang pasangan lain memasuki ruangan dan kami keberatan terhadap kedatangan pasangan calon itu karena kami kan masih mendaftar, sementara mereka agenda malam hari itu kan nggak ada ke sana," ucapnya.

Sarma kemudian berdebat dengan Kapolres Tapteng AKBP Basa Emden Banjarnahor dan meminta ketegasan dari kepolisian dalam pengamanan. Hal itu guna menghindari bentrok antar pendukung yang sudah memanas.

"Jadi pada waktu itu saya duluan berdebat dengan Pak Kapolres supaya ada ketegasan, jangan ada pasangan calon lain yang masuk tanpa ada urusan yang jelas karena bisa menimbulkan bentrok antar pasangan calon karena massa di luar itu kan udah panas," ujarnya.

Namun permintaan Sarma itu tidak dilaksanakan oleh kepolisian. Sarma juga sempat berdebat dengan pasangan calon lain yang hadir di KPU itu.

Sarma menuturkannya Masinton kemudian ikut berbicara ke polisi seperti yang di video. Hal itu lah yang melatarbelakangi peristiwa yang muncul di video.

"Karena tidak adanya ketegasan kepolisian pada malam hari itu, di situ lah Pak Masinton meminta supaya polisi bertindak tegas, jangan ada pembiaran supaya tidak terjadi chaos antar massa pendukung, itu rangkaian kejadiannya," tutupnya. (det/js)